

GIAT SD

GALERI INFORMASI, AKTIVITAS, DAN TRANSFORMASI SEKOLAH DASAR



GOTONG ROYONG WUJUDKAN TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

LAPORAN UTAMA

HADIRKAN SUASANA
MENYENANGKAN DI
KELAS AWAL

PROGRAM UNGGULAN

PENYALURAN BOSP
CATATKAN REKOR
TERCEPAT

OPINI

MASUK SD
TANPASELEKSI
CALISTUNG

PRAKTIK BAIK

MENGHAPUS JEJAK
SAMPAH MELALUI
DAUR ULANG



**MERDEKA
BELAJAR**

**Pimpinan dan Staf Direktorat Sekolah Dasar,
Kemendikbudristek**

Mengucapkan

Selamat

Idul Fitri
1445 H

**Taqabbalallahu Minna Waminkum
Mohon Maaf Lahir dan Batin**

SUSUNAN REDAKSI

SALAM DIREKTUR

OPTIMISME IDULFITRI

Setelah berpuasa sebulan lamanya, tibalah saatnya merayakan Idulfitri. Datangnya Idulfitri menjadikan hati lapang karena kita bersedia memberi maaf dan menerima maaf. Tidak ada dendam di dalam hati. Dosa dan kesalahan itu berat, sehingga terasa sulit dipikul. Ketika kita lepaskan, hati menjadi lapang. Senyum ceria terpancar dari hati yang gembira.

Idulfitri juga mencerminkan optimisme. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum (semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian) adalah cerminan dari optimisme, bahwa Allah SWT akan menerima amalan kita, betapa pun sebagai manusia kita tidak lepas dari khilaf dan dosa ketika menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan.

Optimisme juga tersirat dari ucapan minal aidin wal faizin yang diikuti permohonan maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita berharap dengan diterimanya amal ibadah di bulan Ramadan, kita semua termasuk golongan yang kembali (fitriah, suci) dan termasuk orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsu.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari dan pekerjaan, sikap optimis juga sangat penting. Perasaan optimis membawa individu pada tujuan yang diinginkan, yakni percaya pada diri dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai insan Direktorat Sekolah Dasar, kita sangat optimis menghadapi tantangan di tahun 2024.

Pada awal tahun ini, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah melakukan rotasi pegawai. Direktorat Sekolah Dasar, misalnya, kedatangan 27 pegawai yang mutasi dari Direktorat PAUD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat PMPK, dan Sekretariat Ditjen PAUD Dikdasmen. Sebanyak 26 pegawai Direktorat SD juga mengalami rotasi dan mutasi ke direktorat lain.

Kebijakan rotasi pegawai ini dimaksudkan untuk terus mengembangkan organisasi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan pengalaman di tempat kerja yang baru, kita memiliki perspektif yang lebih lengkap tentang permasalahan dunia pendidikan yang kita hadapi. Dengan tim yang baru, optimisme kita semakin meningkat.



Dr. Muhammad Hasbi
Direktur Sekolah Dasar, Kemendikbudristek

Pelindung:

Muhammad Hasbi

Tim Pelaksana:

Penanggung Jawab

Kori Rahadian

Pembina

Jumeri

Drs. Harmanto

Abdul Halim M

Sugiyanto

Drs. Suyatto

Pemimpin Redaksi

Kurniawan

Redaktur Pelaksana

Minhajul Ngabidin

Samto

Eko Susanto

Arwan Syarief

Redaktur

Muhammad Wisnu Prabowo

Azkie Yuni Syafira

Enfira Yanuaristi

Iwhan Ambar Saputro

Arie Fitria

Lanny Anggraini

David Eka Wardoyo

Editor

Amalia Khairati

Hildha Salawati

Sifa Lutfiyani Atiqoh

Rita Pranawati

Hendriyanto

Naisyah Maulida M

Reporter

Mulyadi

Talitha Luthfia Izza P

Nastyawati

Septa Aristiani Saputri

Rina Fitriana

Penerbit

Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Alamat Redaksi

Gedung E Lantai 17 - 18, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA



06

YUK, DUKUNG TRANSISI ANAK PAUD KE SD

09

HADIRKAN SUASANA MENYENANGKAN DI KELAS AWAL

12

PEMBELAJARAN MENYENANGKAN DI SEKOLAH



OPINI

14

MASUK SD TANPA SELEKSI CALISTUNG

PROGRAM UNGGULAN

16

PENYALURAN BOSP CATATKAN REKOR TERCEPAT

19

SEKOLAH BISA REALISASIKAN PROGRAM LEBIH CEPAT

PROGRAM UNGGULAN

22

**CEGAH DAN TANGANI
KEKERASAN DI SEKOLAH**

25

**OPTIMALKAN
PEMUTAKHIRAN DAPODIK**

28

**PERSIAPKAN KUALITAS
GURU KELAS I SD**



PRAKTIK BAIK

38

**MENJAGA KERAGAMAN
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**



PRAKTIK BAIK

30

**SDN 22 BARINGIN
BUDAYAKAN HIDUP SEHAT**

33

**KETIKA MURID SD MANFAATKAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SECARA BERETIKA**



POJOK INFO

40

**PAYUNG HUKUM IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA**

41

**PEMBARUAN DATA
RAPOR PENDIDIKAN 2024**

42

**SEMANGAT DIREKTORAT
SD MENUJU ZI-WBK**

36

**MENGHAPUS JEJAK SAMPAH
MELALUI DAUR ULANG**

YUK, DUKUNG TRANSISI ANAK PAUD KE SD

Masa transisi dari PAUD ke SD/MI merupakan momen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, sudah sepatutnya kita memastikan proses ini berjalan secara baik dan menyenangkan. Melalui episode ke 24 Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah meluncurkan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Direktur PAUD Kemendikbudristek, Komalasari mengatakan siklus pertama Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan telah dilewati pada tahun 2023. Terdapat tiga target perubahan dari gerakan ini yaitu menghilangkan tes baca, tulis dan berhitung (calistung) dalam masa penerimaan siswa baru, menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan

Sekolah (MPLS), serta berharap satuan PAUD dan SD dapat menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasi.

"Tahun lalu kita telah melewati siklus pertama. Bersama-sama, kita telah mendorong kehadiran Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan melalui Merdeka Belajar Episode ke-24; kita juga

sudah melakukan penyebaran Surat Edaran terkait gerakan ini dan telah diimplementasikan oleh lebih dari 502 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia; rangkaian rapat koordinasi untuk dinas dan bimbingan teknis bagi Pokja Bunda PAUD dari 514 kota/kabupaten juga sudah kita laksanakan, termasuk mengajak mitra untuk bergerak bersama-sama, memahami tiga target

Sumber: Direktorat SD



Murid bermain di halaman sekolah.



Guru membimbing murid kelas awal.

Sumber: Direktorat SD

perubahan dari gerakan dan sosialisasi berbagai alat bantu untuk mencapai tiga target tersebut,” papar Komalasari.

Ia melanjutkan, tiga target tersebut dirumuskan untuk meluruskan kesalahpahaman tentang kemampuan calistung, yang sering dianggap sebagai satu-satunya kemampuan yang perlu dipupuk pada anak usia dini. Target ini juga mengingatkan kita semua bahwa anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang beragam, sehingga kemampuan fondasi yang utuh perlu kita bangun sejak di PAUD dan dapat terus dilanjutkan di kelas awal pada jenjang pendidikan dasar. Ketiga target juga memandu kita semua dalam penerapan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan

belajar anak di PAUD dan jenjang pendidikan dasar kelas awal.

Dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD pada tahun pertama, tiga target perubahan ini telah dikenal dengan baik di satuan pendidikan dan masyarakat. Upaya tersebut diterima dengan sangat baik, sehingga banyak satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, sampai orang tua semakin paham pentingnya pengembangan kemampuan fondasi menyeluruh untuk anak usia dini.

“Awal tahun 2024 ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk melanjutkan siklus berikutnya, tentunya dengan berbagai perbaikan dan penguatan di dalamnya. Saya menyoroti pentingnya menjaga momentum ini, sehingga

“

Anak memiliki laju perkembangan dan kesempatan belajar yang beragam, sehingga kemampuan fondasi yang utuh perlu kita bangun sejak di PAUD dan dapat terus dilanjutkan di kelas awal pada jenjang pendidikan dasar.

Komalasari

Direktur PAUD
Kemendikbudristek

gerakan yang kita usung secara gotong royong ini dapat memberikan dampak lebih masif dan konstruktif dalam memaknai penguatan transisi PAUD ke SD/MI kelas awal, sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak,” ujar Komalasari.

Penting untuk kita ingat bersama, lanjutnya, bahwa gerakan ini bukanlah gerakan sesaat, tetapi perlu dijaga keberlanjutannya. Pemahaman mengenai tiga target perubahan perlu terus diperkuat, advokasi harus terus dilakukan, terutama bagi satuan Pendidikan yang belum melaksanakannya. Satuan pendidikan yang telah menjalankan gerakan ini dapat didorong untuk saling berbagi praktik baik kepada satuan pendidikan lainnya.

“Dan yang perlu diperkuat di tahun ini adalah pendampingan

ke satuan pendidikan, baik satuan PAUD maupun SD/MI, terutama dalam meningkatkan kapasitasnya untuk terus-menerus menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi peserta didik,” ujarnya.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi mengatakan, diperlukan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor agar Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dapat dilakukan secara masif dan konstruktif.

“Penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sangat penting untuk mengubah miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Kemendikbudristek berkomitmen untuk mewujudkan penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan agar

pelaksanaannya dapat berhasil baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke satuan pendidikan dan orangtua/masyarakat,” ujar Muhammad Hasbi.

Ia menjelaskan, Transisi PAUD-SD adalah penyesuaian pembelajaran PAUD-SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD; dan agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi.

“Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun,” katanya. (*)



Murid SD kelas awal bermain sambil belajar.

Sumber: Direktorat SD

HADIRKAN SUASANA MENYENANGKAN DI KELAS AWAL

Dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota berperan penting menyukseskan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Berbagai strategi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor untuk mendorong warga sekolah menghadirkan suasana menyenangkan bagi anak-anak di kelas awal sekolah dasar.

Terinspirasi budaya gotong royong, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengajak semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan terlibat dalam menyukseskan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Ajakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk surat edaran yang ditujukan kepada pengawas sekolah, organisasi mitra, dan

satuan pendidikan jenjang SD maupun PAUD.

Setelah terbitnya Surat Edaran, Dinas Pendidikan menginisiasi pembentukan forum komunikasi yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Bunda PAUD dan kepala sekolah. Di forum komunikasi inilah rutin dilakukan diskusi supaya Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dapat dipahami

oleh warga sekolah dan orang tua murid, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

"Dinas Pendidikan Kota Bekasi membuat surat perintah kepada pengawas untuk melaksanakan gerakan kunjungan sekolah; siswa PAUD didorong untuk berkunjung ke sekolah dasar. Dalam kunjungan tersebut, siswa diperkenalkan pada situasi, kondisi, proses belajar serta lingkungan



Ceria bersama teman-teman di sekolah.

Sumber: Direktorat SD

belajar yang ada di sekolah dasar,” kata Hanafi, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Tidak hanya itu, seluruh guru kelas rendah sekolah dasar yaitu kelas 1 dan kelas 2 diminta mengunjungi sekolah PAUD terdekat. Tujuannya supaya guru mempelajari dan memahami proses belajar mengajar di satuan PAUD, sehingga bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas rendah sekolah dasar.

Tidak sampai di situ saja, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan surat edaran kepada satuan pendidikan. Isinya menghimbau pihak sekolah menghilangkan tes baca, tulis dan hitung (calistung) dalam penerimaan siswa didik baru. Serta menghimbau satuan pendidikan untuk melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) minimal dua minggu.

MPLS khususnya di tingkat SD merupakan tahap awal yang sangat penting bagi para siswa baru untuk mereka bisa

memiliki kecintaan kepada sekolah. Waktu dua minggu ini bisa dioptimalkan oleh guru dan seluruh ekosistem pendidikan untuk membangun serta menciptakan rasa nyaman, aman dan menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian anak akan rindu serta ingin terus berada di lingkungan sekolahnya untuk bermain, berinteraksi serta belajar bersama.

Salah satu indikator dari

keberhasilan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yaitu menghadirkan suasana “taman” sehingga siswa ketika berada di rumah rindu untuk bertemu teman dan gurunya. Dan senantiasa bercerita kepada kakak, adik serta keluarganya apa saja yang dia rasakan ketika bersekolah.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi, lanjut Hanafi, memastikan pengawas memberikan

SATUAN PENDIDIKAN MEMILIKI TANGGUNG JAWAB MEMBANGUN ENAM FONDASI PENDIDIKAN, YAITU:

1. Mengenal nilai agama dan budi pekerti;
2. Keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi;
3. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar;
4. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar;
5. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri;
6. Pemaknaan belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif.



Sumber: Direktorat SD

Murid jalan sehat menyusuri kebun sekitar sekolah.

pendampingan kepada satuan pendidikan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan serta efektif dalam membangun enam kemampuan fondasi dasar anak.

“Jadi bukan hanya kognitif saja yang ditekankan kepada siswa baru kelas rendah, tapi yang tidak kalah penting adalah peserta didik harus menguasai nilai karakter pembiasaan agar mereka lebih mandiri di sekolah,” katanya.

Hanafi melanjutkan, hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan dalam menyukseskan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan adalah menghimbau pengawas sekolah selalu berkoordinasi dengan satuan pendidikan, kemudian membentuk kelompok belajar yang beranggotakan guru-guru untuk berdiskusi dan berinovasi mengeluarkan gagasan dan idenya. Para guru ini didorong untuk membuat aksi nyata yang nanti hasilnya diunggah ke Platform Merdeka Mengajar.

Dinas Pendidikan berperan melakukan evaluasi, monitoring sekaligus menginformasikan dashboard capaian mereka kepada kelompok belajar guru. Nantinya para guru juga bisa mengevaluasi sekaligus mengukur tingkat capaian mereka. Apabila ada satuan pendidikan yang belum optimal memanfaatkan platform dan belum ada aksi nyatanya, Dinas Pendidikan meminta guru yang sudah memiliki sertifikat pelatihan mandiri untuk membantu teman-temannya mengalami kesulitan.

Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Susilawati menuturkan, pihaknya juga telah menerbitkan surat edaran tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan kepada satuan pendidikan, dan menerbitkan SK Kepala Dinas untuk membentuk

forum komunikasi sebagai dukungan langkah penguatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melaksanakan berbagai bimbingan teknis dengan sasaran guru PAUD maupun guru SD. Sejak 2013, sekolah dasar di Kabupaten Bogor sudah menghilangkan tes calistung dalam penerimaan siswa baru kelas satu, dan menyelenggarakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan durasi selama dua minggu.

“Kami sudah melaksanakan webinar kepada satuan pendidikan PAUD dan SD dalam melaksanakan aksi nyata yang diunggah di Platform Merdeka Mengajar. Ada pertemuan-pertemuan forum komunikasi PAUD dan SD dalam rangka mempersiapkan anak-anak untuk mencapai pemahaman mereka terhadap pembelajaran PAUD ke SD,” ujar Susilawati.

Semua strategi itu sudah dilakukan di tahun 2023. Pada

tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan dengan melakukan sosialisasi lebih massif. Dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak untuk memperluas pemahaman gerakan ini mengingat jumlah SD di Kabupaten Bogor sangat banyak yaitu mencapai 1.870 sekolah.

“Perlu kerja keras dan komitmen seluruh stakeholder pendidikan, terutama teman-teman pengawas, mitra kerja untuk bisa saling berkolaborasi, memberikan informasi dan menjalin komunikasi sehingga gerakan ini bisa lebih sukses ke depannya,” pungkas Susilawati. (*)



Ban sepeda bekas jadi alat bermain yang seru dan menyenangkan.

Sumber: Direktorat SD

PEMBELAJARAN MENYENANGKAN DI SEKOLAH

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diselenggarakan selama dua minggu merupakan bagian dari Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. MPLS harus bebas baca, tulis dan berhitung (Calistung) serta fokus pada pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak.

Saat matahari pagi menyapa penuh hangat dari ufuk timur, tampak seirama dengan kehangatan yang terjadi di SDN 01 Bontang Utara, Kalimantan Timur. Dengan penuh keramahan para guru menyambut murid-murid baru di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dilaksanakan pada awal ajaran baru tahun 2023/2024.

Kepala SDN 01 Bontang Utara, Yani Astutik bercerita, banyak moment yang terekam di hari

pertama MPLS. Ada murid baru yang gugup dan menangis, ada juga yang terlihat bersemangat dan tersenyum lepas saat ia datang ke sekolah untuk pertama kalinya. Banyak juga orang tua yang setia menunggu anak-anak mereka di hari pertama sekolah.

Meski ada peserta didik yang gugup, iklim belajar di sekolah pesisir pantai ini terasa sangat menyenangkan dan penuh kasih sayang. Semua tergambar jelas saat guru menyambut tiap

peserta didik di gerbang sekolah dengan senyum yang memancar. "Ada banyak keceriaan di hari pertama sekolah. Peserta didik baru langsung kami ajak menemukan dunia yang menyenangkan, teman-teman baru, dan pengalaman baru," kata Yani Astutik.

Setiap hari adalah hari yang istimewa. Ruang kelas yang penuh warna-warni menyambut kehadiran peserta didik baru. Meja-meja yang tersusun rapi seakan mengundang peserta didik baru untuk menimba ilmu dengan cara yang menyenangkan. Di dalam kelas tersedia ruang untuk menulis, menggambar, dan mengeksplorasi. Ada juga ruang untuk berbagi kisah dan pengalaman selama libur sekolah.

Nuansa keceriaan juga terlihat saat para peserta didik baru diajak mengeksplorasi ruang kelas, taman bermain, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Tidak ada Calistung untuk murid-murid baru.



Murid SD kelas awal kompak mengacungkan tangan.

Sumber: Direktorat SD



Guru menyambut murid di halaman sekolah.

Pembelajaran berfokus pada membangun enam kemampuan fondasi anak, yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti, keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi, kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri, dan pemaknaan terhadap belajar yang positif.

Hal senada disampaikan Susi, Kepala SDN Kebon Jeruk, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia menegaskan penerimaan murid baru kelas satu di sekolahnya sudah sejalan dengan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, yaitu sudah menghapuskan tes Calistung

saat menerima pendaftaran murid baru.

“Kami hanya menyeleksi murid baru berdasarkan usia apakah sudah layak masuk sekolah dasar, serta seleksi berdasarkan zonasi. Kami sudah tidak menggunakan tes Calistung,” ungkap Susi. Pihaknya juga sudah melaksanakan berbagai program seperti pelatihan guru kelas satu dan pemetaan konsep pengajaran diagnostik.

Tri, Guru Kelas 1C SDN Kebon Jeruk menuturkan, pengenalan lingkungan sekolah kepada murid kelas rendah dilakukan semenarik mungkin, misalnya pembelajaran diiringi *game*. Tujuannya agar anak-anak merasa nyaman pada masa transisi dari PAUD ke SD. “Dengan suasana kelas yang menyenangkan, anak-anak tidak akan merasa *under pressure*. Kita sebagai guru harus bisa membuat mereka merasa seolah-olah di rumah,” ujarnya.

Pada masa awal masuk sekolah inilah Tri memantau dan mengamati setiap anak. Setiap anak memiliki karakter dan keunikan sendiri. Jika ada anak

murid yang menonjol di bidang tertentu, Tri akan mengarahkan anak tersebut pada potensi yang dimilikinya.

Mengajar kelas 1 SD tentu saja tidak mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi terutama dalam menghadapi setiap karakter murid yang berbeda beda. Tri menuturkan untuk usia kelas satu, guru tidak bisa melakukan penerapan pembelajaran secara klasikal, namun harus melalui pendekatan-pendekatan khusus terutama bagi anak yang hiperaktif.

“Untuk anak yang masih belum bisa lepas dari ibunya berarti saya pribadi harus melakukan pendekatan secara individu dan secara ekstra. Terutama harus ada komunikasi dua arah dengan orang tuanya. Intinya sih saya lebih kepada mengkomunikasikan segala hal, baik dengan murid, para guru maupun orang tua murid,” jelas Tri.

Aisyah, salah satu wali murid dari Kelas 1B SDN Kebon membenarkan bahwa dalam penerimaan murid baru di sekolah tersebut sudah tidak ada tes Calistung. “Alhamdulillah sudah tidak ada tes Calistung, jadi kami sebagai orang tua merasa senang karena anak tidak merasa terbebani,” katanya.

Sebagai orang tua, ia menilai kebijakan tidak ada tes calistung sangatlah baik. Sebagai orangtua ia sangat mendukung kebijakan tersebut. Dengan tidak adanya tes Calistung memberikan pengaruh positif terhadap psikologis anak. Anak-anak cenderung menjadi semangat untuk pergi ke sekolah.

“Anak saya sangat semangat sekali masuk ke SD. Pagi-pagi sudah mandi, sudah sarapan pagi, dan antusias sambil teriak ‘hore aku udah anak SD sekarang,’” katanya. (*)

MASUK SD TANPA SELEKSI CALISTUNG

Oleh Dr. Sugiyanto



Seperti diketahui bersama bahwa Merdeka Belajar bukan sebuah kebijakan tunggal, melainkan tema atau benang merah yang menyatukan rangkaian kebijakan untuk mentransformasi pendidikan. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai, tentunya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Dengan mengacu pada konsep trisentra pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu 'di dalam hidupnya anak-anak ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu *alam perguruan, alam pergerakan pemuda dan alam keluarga*, untuk menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya'.

Misi pendidikan yang diemban oleh Ki Hajar Dewantara, sebagai bangsa timur adalah pendidikan yang menghasilkan insan yang humanis, kerakyatan dan kebangsaan, dengan gerakan politik pembebasan atau kemerdekaan. Relevan dengan hal itu, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Merdeka Belajar episode ke-24; Gerakan Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan, dengan salah

satu perubahan yang harus dilakukan adalah mengubah paradigma baca, tulis dan hitung (calistung) sebagai tolok ukur anak bisa diterima di SD, untuk ditiadakan.

Salah Pemahaman Calistung

Telah terjadi salah pemahaman bahwa kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada calistung dan dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Di pihak lain ada juga yang memahami secara keliru bahwa calistung dipahami dengan sempit, dan dianggap dapat dibangun secara instan. Bahkan sudah lama terjadi pada sebagian SD yang kurang bijak menerapkan tes calistung sebagai syarat masuk SD, padahal sudah ada peraturan yang tidak memperbolehkannya.

Mari kita pelajari dan ketahui bersama bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar (khususnya PAUD dan SD), di sisi lain Indonesia sangat luas wilayahnya, letak geografi, dan berbagai tantangan lainnya, termasuk belum memadainya PAUD yang tersiapkan, yang berakibat banyak anak-anak yang belum pernah mendapatkan

kesempatan belajar di satuan PAUD. Itu semua kita berharap seluruh peserta didiknya tetap mendapat haknya untuk mendapat pembinaan kemampuan fondasi, sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk memperoleh pembelajaran selanjutnya.

Agar setiap anak mendapatkan hak mendapatkan pelayanan dasar dan lembaga pendidikan mengerti, memahami dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan, perlu memahami dan mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Dalam rangka merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik diperlukan adanya assesmen awal. Asesmen yang dilakukan oleh guru bukan melabel, melainkan dengan diketahuinya hasil asesmen awal pembelajaran, dapat dijadikan langkah penting di awal tahun ajaran untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa

setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, pengalaman yang unik, dan memiliki peta belajar yang beragam.

Agar pembelajaran berhasil secara maksimal, maka dalam Kurikulum Merdeka capaian pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar kelas awal sudah disusun selaras dengan PAUD, juga tentang buku teks juga sudah dikurasi sehingga anak tidak perlu bisa calistung saat masuk kelas 1 pada jenjang pendidikan dasar. Saatnyalah SD/MI merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi.

Dalam perkembangan peserta didik, mengikuti PAUD memiliki banyak kelebihan, tidak hanya calistung yaitu kemampuan sosial, emosional dan cara berpikir. *Pertama*, membantu anak menyesuaikan diri sebelum masuk SD, yaitu mengenal rutinitas sekolah seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan dan sekedar mengenal huruf dan angka. *Kedua* adalah membuat anak mengikuti aturan/arahan umpamanya membuka sepatu, membaca atau berdoa, anak akan melihat sosok guru dan teman-temannya.

Ketiga, perkembangan emosional dan sosial, anak mengenal dirinya dan *mengeksplorasi* dirinya, mengajarkan kemampuan dasar terhadap tujuan tertentu, berpikir terbuka serta mengendalikan emosi dan lebih percaya diri. *Keempat*, Meningkatkan perkembangan motorik anak, yaitu setiap anak yang telah diasah atau mengikuti kegiatan pembelajaran setidaknya sudah bisa menggemgam pensil atau krayon saat menggambar, anak belajar mengkoordinasi antara tangan dan tubuh saat bergerak. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya menuntut buah hatinya jagoan Calistung, melainkan pembelajaran di PAUD banyak memberikan hasil terbaiknya untuk berkembang dan beradaptasi dalam Pendidikan sehingga lebih mudah dalam meraih prestasinya.

Setelah memahami pentingnya memberikan hak pelayanan pendidikan anak, perlu dilanjutkan dengan memahami minat, bakat dan kemampuan peserta didik. Minat adalah suatu ketertarikan siswa terhadap suatu objek, dalam hal mengikuti pembelajaran seyogyanya siswa diberi keleluasaan untuk menentukan

sendiri kreativitas dan pilihan karirnya. Adapun Bakat, hal yang berbeda dengan minat, yaitu kemampuan anak dalam melakukan sesuatu secara produktif, misalnya, bakat menari, melukis, dan menggambar. Setiap anak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan bakatnya, baik secara akademik maupun non akademik.

Bila minat dan bakat sudah diketahui, berikutnya adalah memperhatikan *kemampuan peserta didik*, suatu kapabilitas mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan. Setiap suatu pekerjaan atau kegiatan tidaklah sama, siswa diberi keleluasaan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuannya. Dengan 3 prinsip dimaksud menjadi landasan yang harus dipahami orang tua dan guru serta siswa sebelum membuat pilihan. Keputusan akan lebih bermakna dibandingkan hanya mengikuti saran teman atau tuntutan orang lain.

Dr. Sugiyanto adalah Widyaprada Ahli Madya Direktorat Sekolah Dasar.

Murid berfoto bersama di halaman sekolah.

Sumber: Direktorat SD



NADIEM ANWAR MAKARIM
Mendikbudristek

PENYALURAN BOSP CATATKAN REKOR TERCEPAT

Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mencetak rekor tercepat sepanjang sejarah. Di bulan Januari tahun 2024 ini, rekomendasi penyaluran tahap I gelombang pertama mencapai 402.831 (96 persen) dari total 419.218 satuan pendidikan. Targetnya, pada bulan Maret 2024, seluruh satuan pendidikan telah menerima Dana BOSP Tahap I.

"Capaian penyaluran sebesar 96 persen di bulan Januari merupakan yang tercepat dan terbaik serta merata di seluruh provinsi sepanjang sejarah pengelolaan Dana BOSP," kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada webinar Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024, Rabu (17/1).

Mendikbudristek menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran dana BOSP, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Menurutnya, berkat kerja sama yang baik, rekor penyaluran dana BOSP tercepat dapat terwujud pada awal tahun ini.

"Hadirnya penyaluran yang

lebih cepat mendukung satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan yang lebih tepat dan penggunaan (dana) yang lebih bermanfaat dalam upaya mewujudkan pendidikan yang unggul dan hebat," imbuh Mendikbudristek.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril mengatakan, sejak tahun 2020 Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga yang merupakan titik awal reformasi kebijakan dana BOS.

Terdapat empat kebijakan yang diluncurkan pada Merdeka Belajar Episode Ketiga, yaitu 1) penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan, 2) satuan biaya yang meningkat sesuai karakteristik daerah, 3) penggunaan Dana yang lebih fleksibel tanpa sekat-sekat



Aktivitas belajar mengajar di kelas.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

persentase penggunaan, dan 4) pelaporan dana yang diperketat untuk menjaga akuntabilitas. Kebijakan ini telah memberikan tanggapan positif dan dampak nyata dari berbagai pemangku kepentingan.

Hasil kajian Pusat Penelitian dan Kebijakan (2020) menyatakan penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan telah mengurangi keterlambatan sebesar 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, penelitian Kompas juga memberikan hasil yang sama, 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan. Selanjutnya, pada tahun 2022, praktik baik ini diterapkan pada kebijakan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Selama empat tahun implementasi kebijakan penyaluran langsung, menunjukkan performa penyaluran yang variatif. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang

dibangun Pemerintah itu sendiri. Tahun 2020, Pemerintah hanya mensyaratkan rekening satuan pendidikan dan 63% satuan pendidikan masuk pada rekomendasi penyaluran gelombang pertama pada 7 Februari 2020.

Tahun 2021, Pemerintah mulai menerapkan pelaporan tahap II tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran tahap I tahun berikutnya dan 87% satuan pendidikan masuk pada rekomendasi penyaluran gelombang pertama pada 17 Februari 2021.

Tahun 2022, Pemerintah menerapkan pelaporan dan rekening yang standar pada penyaluran Tahap I dan 77% satuan pendidikan masuk pada rekomendasi penyaluran gelombang pertama pada 27 Januari 2022.

Performa penyaluran tahun 2023 yang kurang memuaskan menjadi tantangan untuk melakukan perbaikan dalam mengedepankan keberpihakan kepada satuan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan kebijakan pelaporan

sisa dana yang perlu reviu aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah dan sisa dana diperhitungkan pada penyaluran Tahap I menjadi faktor penyebab keterlambatan penyaluran.

Pemerintah kemudian merelaksasi ketentuan syarat penyaluran Tahap I dan memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan di tahap II. Ketentuan ini merupakan langkah percepatan penyaluran yang tetap menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOSP. Hasilnya, BOSP tahap I dapat tersalur 96% di bulan Januari 2024.

"Kebijakan ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh satuan pendidikan dimana satuan pendidikan tidak perlu lagi mencari dana talangan atau menyisakan anggaran untuk kebutuhan di awal tahun anggaran," kata Iwan Syahril.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Praptono menuturkan, sebanyak 96 persen atau 402.831 satuan

pendidikan telah direkomendasi penyalurannya pada tahap satu gelombang pertama dan hingga kini proses tersebut masih berlangsung. “Dinas pendidikan dan satuan pendidikan dapat memantaunya pada aplikasi BOS Salur,” tambah Praptono.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan 17 Januari 2024 berjumlah 159.396 (40 persen), SP2D sampai dengan 18 Januari sejumlah 341.824 (85 persen), dan SP2D sampai dengan tanggal 19 Januari sejumlah 385.174 (95 persen) tersalur ke rekening satuan pendidikan.

“Berbagai platform teknologi seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) juga hadir untuk mendukung pengelolaan dana BOSP mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” imbuh Praptono.

Praptono juga mengingatkan terkait tiga langkah penting menyusun perencanaan yang berbasis data untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan efektif. Pertama, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Profil Pendidikan. Kedua, melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan

pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Ketiga, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah (APBD) untuk menyelesaikan akar masalah.

Penyaluran dana BOSP yang mencapai rekor tercepat ini mendapat sambutan positif dari satuan pendidikan. Ignasius Ghele Radja, Kepala SMP Negeri 1 Ende, Kabupaten Ende, mengatakan kebijakan tersebut sangat bagus. “Kami akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program yang sudah direncanakan berdasarkan hasil identifikasi di Rapor Pendidikan,” kata Ignasius Ghele Radja.

Hal senada disampaikan Abdul Samad, Kepala SLB Negeri Kotabaru, Kabupaten Kotabaru. Pencairan dana BOSP lebih awal di bulan Januari, menurutnya merupakan kabar yang menggembirakan bagi sekolah. Sebab, pencairan dana BOSP ini memberi manfaat yang luar biasa besar bagi sekolah dan siswa.

“Kita bisa melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh sekolah lebih awal sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para murid,” katanya seraya mengajak satuan pendidikan untuk memanfaatkan dana BOSP 2024 dengan tepat, akuntabel, dan transparan guna mewujudkan pembelajaran berkualitas bagi murid. (*)

“

Kita bisa melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh sekolah tepat waktu sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para murid.

Abdul Samad
Kepala Sekolah

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

Murid belajar bersama.





Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

SEKOLAH BISA REALISASIKAN PROGRAM TEPAT WAKTU

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang cair lebih awal di bulan Januari 2024 disambut gembira oleh warga sekolah. Kebijakan ini membantu sekolah dalam mengeksekusi perencanaan dan program lebih cepat.

Kepala SD Inpres Kakor, Yasintus Tinja mengungkapkan dirinya sangat gembira. Pencairan dana BOSP lebih awal di tahun 2024 ini sangat membantu pihaknya dalam mengeksekusi perencanaan program yang sudah dibuat.

“Di awal tahun 2024 ini sekolah kami tengah gencar melakukan kegiatan pengembangan komunitas belajar sebagai

wadah bagi pengembangan guru. Dengan adanya dana yang cair lebih cepat, tentu saja sangat membantu kami untuk segera membentuk komunitas sesuai dengan divisi masing-masing,” ungkap Yasinitus.

Di dalam komunitas belajar yang mereka bangun tersebut sudah ada divisi masing-masing dan tinggal dieksekusi kegiatannya. Dengan adanya

pencairan dana BOSP lebih cepat ini mendorong semangat mereka untuk segera merealisasikan program tersebut. “Para guru sangat semangat dan sudah tidak sabar menjalankan program,” ungkap laki-laki yang biasa disapa Yasin itu.

Dana BOSP yang cair lebih awal tidak hanya mempercepat program yang sudah dibuat, tapi juga mempercepat pihak sekolah



Murid mencatat hal-hal penting dari buku pelajaran.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

untuk berbelanja modul atau buku bahan pembelajaran yang dibeli melalui aplikasi SIPLah.

Yasin mengatakan pihaknya selalu membeli kebutuhan buku pembelajaran melalui aplikasi SIPLah. Setiap buku yang dibeli di aplikasi tersebut akan sampai ke sekolah jika sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oleh karena itu dengan cairnya dana BOSP lebih awal ini turut memudahkan mereka untuk bisa mendapatkan buku pembelanjaan lebih awal.

“Karena ketika bukunya lebih cepat datang, maka lebih cepat juga bisa kita gunakan. Sebelumnya, karena terkendala biaya, kadang buku yang kita butuhkan baru datang ketika semester itu sudah berjalan. Jadi dengan adanya BOSP yang cair lebih awal ini membantu kami dalam melakukan pembelian buku lebih cepat di aplikasi SIPLah,” tuturnya.

Selama menerima dana BOSP, Yasin mengungkapkan sekolahnya tidak menghadapi kendala yang berarti dalam penggunaan dana disesuaikan dengan regulasi yang ada, hanya saja mereka kesulitan dalam membuat laporan keuangan. “Tapi kami tidak menganggap itu sebuah kendala melainkan sebuah tantangan.

Karena kita dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis (juknis),” pungkas Yasin.

Azizah, Kepala SMPN 1 Sabang mengatakan, pencairan dana BOSP di awal tahun ini menggembirakan bagi para guru honorer. Bahkan Ketika ia mengumumkan bahwa BOSP cair lebih awal Januari, yang artinya gaji guru honorer bisa dibayarkan setiap bulan, mereka berteriak kegirangan.

“Kami senang dana BOSP cair lebih awal. Ini artinya sekolah tidak perlu lagi cari pinjaman dana ke sana ke mari untuk membiayai program. Kami Tidak harus kepikiran lagi untuk mencari biaya kebutuhan sekolah terutama untuk bayar guru honorer,” ungkapnya dengan antusias.

Ada hal yang menarik terkait suka duka pencairan dana BSOP yang telat. Biasanya pihak sekolah menerima dana BOSP di bulan Februari atau bahkan April. Sebelum dana cair, pihak sekolah selalu nunggu pembayaran listrik, air dan wifi. Tapi sekarang mereka bahagia karena akan membayar segala kebutuhan sekolah tepat waktu, tanpa harus berutang.

“Untungnya pihak PLN dan PDAM sangat mengerti kami, listrik



Ketika bukunya lebih cepat datang, maka lebih cepat juga bisa kita gunakan. Sebelumnya, karena terkendala biaya, kadang buku yang kita butuhkan baru datang ketika semester itu sudah berjalan. Jadi dengan adanya BOSP yang cair lebih awal ini membantu kami dalam melakukan pembelian buku lebih cepat di aplikasi SIPLah.

Yusintus Tinja

Kepala SD Inpres Kakor

sekolah tidak pernah diputus dan air pun tetap mengalir. Provider internet juga paham situasi yang kami hadapi. Dan alhamdulillah situasi sulit itu tidak akan terjadi tahun ini karena dana BOSP cair sejak pertengahan Januari,” cerita Azizah.

Dengan adanya dana BOSP cair lebih awal, Azizah dan para guru bersemangat untuk segera merealisasikan berbagai program sekolah. Diantaranya membuat saluran air, kegiatan lomba minat dan bakat siswa, serta mendatangkan guru tambahan dari luar untuk melatih siswa.

“Rencana Kerja Sekolah (RKS) kami kan sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan, banyak yang mau kami buat di bulan Januari ini. Kita akan membuat got untuk saluran air biar tidak ada lagi genangan air, apalagi bulan Januari selalu hujan. Selain itu kami tengah mempersiapkan lomba minat dan bakat siswa. Kami juga mendatangkan guru untuk melatih kegiatan ekstrakurikuler anak-anak di sekolah,” ungkapny.

Azizah mengatakan pihaknya sangat siap menjalankan semua program yang sudah dibuat. Jadi ketika dana BOSP cair lebih awal mereka sudah tidak bingung lagi program mana yang terlebih dulu akan dilaksanakan. Azizah mengaku, Rencana Kerja Sekolah (RKS) tahun 2024 yang sudah mereka buat merupakan lanjutan dari RKS tahun lalu, namun yang diambil hanya program prioritasnya saja.

“Jadi dana BOSP ini kami gunakan untuk program prioritasnya dulu. Karena di sekolah kami hanya memiliki dana BOS saja dan tidak memiliki dana yang lainnya. Jadi kalau kita tidak bisa memaksimalkan dana ini dengan baik maka banyak hal yang tidak bisa kita penuhi,” kata Azizah.

Anita Hasibuan, Kepala

SMPN 1 Kisaran Asahan mengungkapkan, sebelumnya ia selalu merasa stres ketika Dana BOSP belum cair. Sementara ia harus membayar gaji guru honorer dan juga ada kegiatan sekolah yang harus dilakukan.

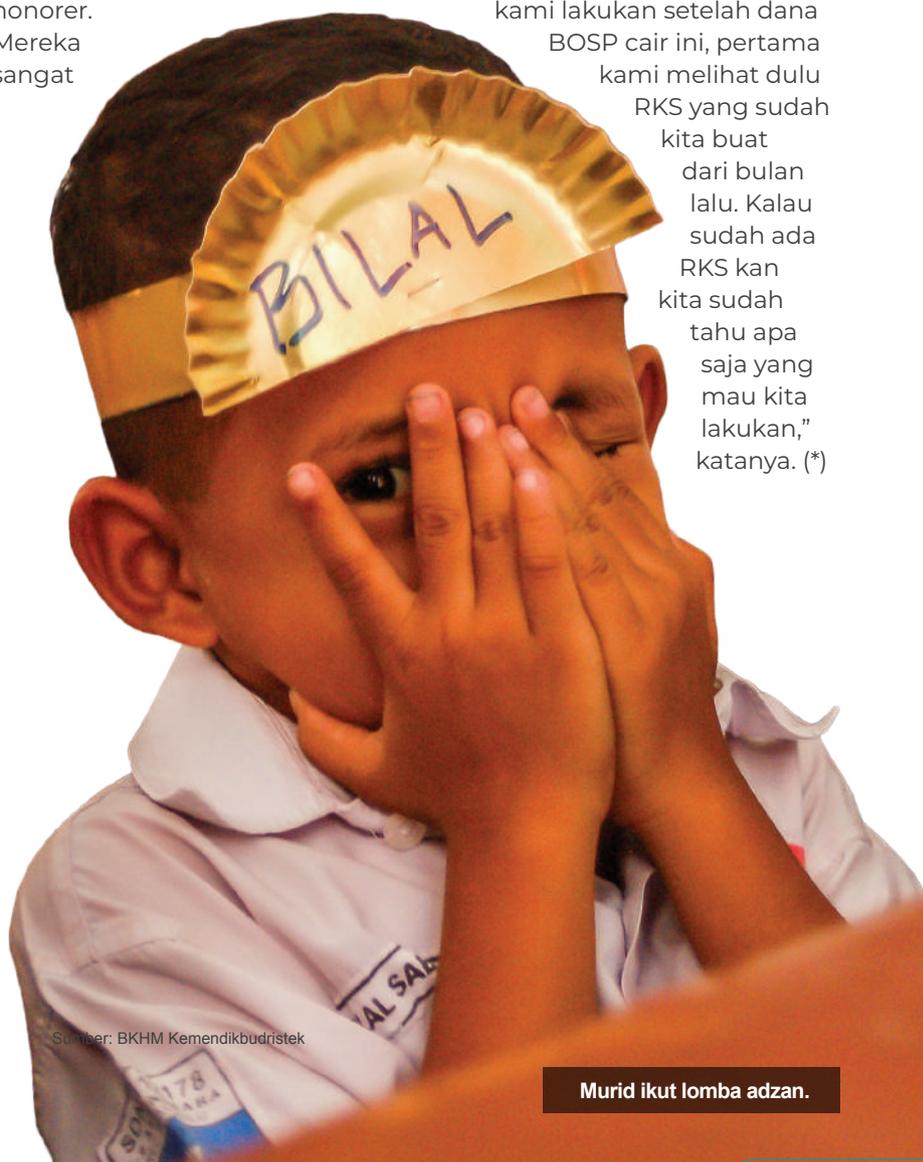
Anita menuturkan, sekolahnya menyiapkan dana untuk guru honor sekitar 42% dari dana BOSP. Sekolah yang dipimpin Anita dibantu oleh 20 guru honorer. Ia mengungkapkan, dulu saat pencairan dana BOSP selalu telat mereka harus memutar otak untuk mengantisipasi gaji guru honorer tersebut.

“Ketika dana BOSP tahun ini cair lebih awal kami sangat senang, terutama guru honorer. Mereka sangat

antusias bahkan sampai bertepuk tangan saat mendengar kabar gembira ini. Kami juga sangat mengapresiasi kepada pemerintah yang sudah mengupayakan dana BOSP bisa cair lebih awal,” kata Anita penuh semangat.

Ia menambahkan, dengan adanya BOSP yang cair lebih awal, semakin menambah semangat mereka untuk merealisasikan program-program yang sudah direncanakan. Mereka juga memanfaatkan semaksimal mungkin dana BOSP untuk kebutuhan sekolah yang mereka beli melalui aplikasi SIPLAH.

“Jadi langkah-langkah strategis dari perencanaan yang kami lakukan setelah dana BOSP cair ini, pertama kami melihat dulu RKS yang sudah kita buat dari bulan lalu. Kalau sudah ada RKS kan kita sudah tahu apa saja yang mau kita lakukan,” katanya. (*)



Sumber: BKHM Kemendikbudristek

Murid ikut lomba adzan.

CEGAH DAN TANGANI KEKERASAN DI SEKOLAH

Masyarakat menginginkan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Sesungguhnya di satuan pendidikan seperti itulah akan tumbuh bakat dan minat anak secara optimal. Permendikbudristek No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan pembentukan TPPK di satuan pendidikan, dan Satuan Tugas di tingkat pemerintah daerah.

Keanggotaan dan target waktu pembentukan TPPK dan Satuan Tugas dibedakan untuk menyesuaikan konteks dimana tim dibentuk

Pasal 24 s.d. Pasal 35 dan Pasal 76:

| | Pembuat | Target waktu setelah Permen disahkan | Keanggotaan Untuk Pendidikan Formal termasuk Pendidikan Khusus |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| TPPK di PAUD | Satuan Pendidikan | 1 Tahun | Di 1 satuan PAUD (perwakilan pendidik dan perwakilan komite sekolah) |
| | Dinas Pendidikan | | beberapa satuan PAUD (perwakilan pendidik dari beberapa satuan PAUD) |
| TPPK di SD | Satuan Pendidikan | 6 Bulan* | <ol style="list-style-type: none"> Perwakilan pendidik, kecuali kepala satuan pendidikan* Perwakilan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali |
| TPPK di SMP, SMA dan SMK | Satuan Pendidikan | 6 Bulan* | Jika diperlukan keanggotaan TPPK dapat ditambah unsur dari tenaga kependidikan |
| Satuan Tugas | Pemerintah melalui Dinas Pendidikan | 6 Bulan | <ol style="list-style-type: none"> Dinas yang mengurus pendidikan Dinas yang mengurus perlindungan anak Dinas sosial Organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak |

* Keanggotaan TPPK di pendidikan nonformal (kesetaraan) hanya pendidik dan target pembentukannya 1 tahun sejak permendikbudristek PPKSP disahkan

Kekerasan di lingkungan pendidikan masih banyak terjadi sepanjang tahun 2023. Jenis kekerasan yang terjadi beragam, tetapi kasus kekerasan fisik atau psikis dan kekerasan seksual yang paling banyak terjadi. Berdasarkan data KPAI, ada 723 kasus kekerasan yang berhubungan dengan satuan pendidikan di tahun 2023. Sebanyak 487 kasus terkait kekerasan seksual pada anak, 236 kasus kekerasan fisik atau psikis, 87 kasus *bullying* atau perundungan, dan 27 kasus anak

korban kebijakan pendidikan.

“Kita sebagai orang tua sekaligus pengelola pendidikan ingin menghadirkan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Karena sesungguhnya di satuan pendidikan seperti itulah akan tumbuh bakat dan minat anak didik secara optimal. Itulah alasan diterbitkannya Permendikbudristek No. 46/2023 pada Agustus 2023 lalu,” kata Dede Suryaman dari Tim Pengembangan Karakter Kemendikbudristek, Rabu (31/1).

Dalam Permendikbudristek itu ada kewajiban membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan, dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di pemerintah daerah. “Kemendikbudristek mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah segera membentuk tim dan satuan tugas agar kekerasan di sekolah bisa dicegah dan ditangani secara optimal,” katanya.

Dede menjelaskan, kasus kekerasan terutama di



Sumber: kemdikbud.go.id



1. KEKERASAN FISIK

Melukai tubuh orang lain seperti memukul, menendang, berkelahi, terlibat tawuran, dan tindakan menyakiti anggota badan lainnya.



2. KEKERASAN PSIKIS

Menghina, menakuti, atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman, seperti mengejek nama panggilan, mempermalukan, memfitnah orang lain, dan lainnya.



4. KEKERASAN SEKSUAL

Perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan pantat, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender.

3. PERUNDONGAN / BULLYING

Menyakiti tubuh dan perasaan orang lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda secara berulang kali, seperti teman atau kakak kelas yang sering meminta uang/ barang secara paksa atau guru yang selalu meledek siswa di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal.



5. DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Membedakan, memilih-milih, atau membatasi orang lain karena latar belakang yang berbeda seperti suku/etnis, agama, kepercayaan, warna kulit, bentuk rambut, jenis kelamin, kemampuan akademik, mental, fisik, dan lainnya.

6. KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Peraturan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala sekolah, dan/atau kepala dinas pendidikan.



Kamu juga perlu tahu kalau enam bentuk kekerasan itu bisa dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, maupun melalui media sosial atau teknologi, lho!

lingkungan pendidikan tidak bisa diabaikan dan dianggap remeh. Sebab, kasus kekerasan bisa menghambat pencapaian prestasi akademik peserta didik. Anak-anak bisa terganggu motivasinya maupun semangat belajarnya. Bisa jadi juga anak akan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan, karena anak berpotensi keluar dari lingkungan satuan pendidikan atau *drop out*.

Kasus kekerasan menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan akan merusak nama baik satuan pendidikan itu sendiri. "Mari kita bergerak bersama mencegah dan menghilangkan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Sehingga hadir satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi semua warga satuan pendidikan," ujarnya.

Bukan hanya Kemendikbudristek yang memiliki perhatian besar pada pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, banyak lembaga lain memiliki perhatian yang sama. Sebut saja Kementerian Agama,

Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ditambah tiga lembaga lain yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ada sembilan hal yang diatur dalam Permendikbudristek No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Yakni bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan kekerasan, pembentukan TPPK dan Satuan Tugas, penanganan kekerasan, hak korban, saksi, dan peserta didik sebagai pelapor dalam penanganan kekerasan, partisipasi masyarakat, pengelolaan data kasus, penghargaan dan pendanaan.

"Bentuk-bentuk kekerasan dalam regulasi ini sudah sangat jelas dan tidak abu-abu lagi. Ada enam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan," jelas Dede. (*)

“

Kasus kekerasan menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan akan merusak nama baik satuan pendidikan itu sendiri.

Dede Suryaman

Tim Pengembangan Karakter,
Kemendikbudristek



Murid harus dilindungi dari perundungan.

Sumber: BHKM Kemendikbudristek

OPTIMALKAN PEMUTAKHIRAN DAPODIK

Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbudristek meminta dinas pendidikan kabupaten/kota dan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Pemutakhiran diharapkan dilakukan secara optimal untuk memastikan pengukuran ketercapaian, kurasi dan kualitas data sarana prasarana satuan pendidikan di Dapodik. Pemutakhiran tersebut akan menentukan kualitas dan ketepatan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan tahun 2025.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pada Dapodik, pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar dapat memperhatikan beberapa ketentuan. Pertama, data-data yang dimutakhirkan meliputi data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan, data sarana pendidikan (termasuk buku, TIK, APE, dan lainnya, serta ketersediaan lahan (total luasan lahan, luas lahan tersedia untuk pembangunan).

Kedua, dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil, termasuk

data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana.

Mengingat pentingnya pemutakhiran data sarana prasarana di Dapodik sebagai basis perhitungan (*immediate outcome*), dan landasan perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2025, maka seluruh pemerintah daerah wajib memastikan proses pemutakhiran dilaksanakan pada periode pendataan semester genap tahun ajaran 2023/2024, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2024.

Eko Susanto, Widyaprada Prada Ahli Madya Direktorat

Sekolah Dasar mengatakan, pihaknya sudah turun langsung ke 50 kabupaten/kota untuk melihat permasalahan Dapodik yang masih menjadi persoalan ketika pengajuan DAK Fisik. Banyak satuan pendidikan yang pengajuannya ditolak karena masalah data pada Dapodik.

"Alangkah baiknya jika dinas pendidikan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pemutakhiran data Dapodik. Misalnya mengundang para operator sekolah untuk mengecek kembali apakah data yang mereka update di Dapodik sudah benar," kata Eko dalam webinar

Sumber: BJHM Kemendikbudristek

Guru sedang melakukan pemutakhiran Dapodik.

Optimalisasi Pengusulan Perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan yang tayang di kanal Youtube Ditpsdtv pada Jumat, 15 Maret 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, lanjut Eko, ternyata ada beberapa permasalahan terkait dengan data usulan. Terkadang satuan pendidikan mengusulkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, tetapi usulan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Entah itu luasan lahannya atau kondisi laporan sekolahnya. Ketidaksesuaian data Dapodik dengan kebutuhan sekolah inilah yang perlu diperbaiki.

Dalam kesempatan yang sama, Nurul Mahfudi dari Direktorat Sekolah Dasar menjelaskan, DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan DAK Fisik yaitu mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan SDM yang berdaya saing, ketersediaan data keterjaminan akses untuk mendukung belajar 12 tahun, serta ketersediaan sarana prasarana pendidikan.

“Selain itu, DAK Fisik ini ada kriteria alokasi prioritas yang sudah dibahas dan disepakati oleh Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kementerian PUPR,” ujar Nurul Mahfudi.

Metode pelaksanaan ada dua yaitu pengelola dan penyedia. Ini diserahkan semuanya ke pihak dinas pendidikan, termasuk



Guru sedang mengajar di kelas.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

dengan konsep ketuntasan yang dilakukan berbasis satuan pendidikan. Ketika sekolah tidak memiliki prasarana tertentu, misalnya perpustakaan maka nanti diusulkan Aplikasi Krisna-nya akan muncul usulan perpustakaan.

Semenatra itu menu yang ditampilkan untuk DAK Fisik ada 7 sub bidang, dimulai dari PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK. Untuk jenjang SD hanya menu revitalisasi saja yang terdiri dari 2 besaran. Pertama rehab revitalisasi dan kedua pembangunan prasarana.

“Pada DAK Fisik jenjang SD terdapat beberapa menu yaitu rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, unit UKS, Lab IPA, lab komputer, toilet dan rumah dinas. Sedangkan untuk pembangunan ada ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, UKS, lab komputer, pusat belajar inklusi dan rumah dinas guru. Untuk sarana pendidikan di SD tahun 2024 ada dua menu yaitu TIK dan buku koleksi

perpustakaan,” papar Nurul Mahfudi.

Asep Suharta dari Direktorat SD mengingatkan, *timeline* perencanaan penganggaran DAK Fisik tahun 2025 dimulai pada bulan Maret 2024 ini. Oleh karena itu satuan pendidikan diimbau segera melakukan pemutakhiran data pada Dapodik. Setelah update Dapodik di bulan Maret, nanti akan ada penilaian dari tim Kemendikbudristek terkait usulan DAK.

“Hasil penilaian ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan sinkronisasi pada bulan Agustus. Dari hasil sinkronisasi ini akan ada pagu yang keluar pada akhir Oktober hingga memasuki awal November. Kemudian dilakukan pematangan melalui penyusunan perencanaan DAK Fisik tahun 2025,” jelas Asep.

Kriteria umum satuan pendidikan adalah terakreditasi,

memiliki NPSN, mengisi Dapodik, mendapatkan dana BOS, dan minimal jumlah siswa untuk satuan SD sebanyak 60 orang. Jika siswa tidak memenuhi 60 orang nanti akan terkena filter di Dapodik dan akan terpentol dari calon penerima DAK Fisik.

Khusus rehabilitasi ruang belajar dan ruang lainnya harus dalam kondisi rusak sedang minimal 31%. Selain itu kriteria khususnya untuk rehabilitasi ruang belajar dan ruang lainnya, satuan pendidikan harus upload format PUPR sebelum 31 Maret setiap tahunnya. Sekolah harus melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui pembinaan, pemantauan dan verifikasi dinas pendidikan. Data yang diupdate terkait data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan serta ketersediaan lahan.

“Dinas Pendidikan juga nanti akan melakukan evaluasi kondisi prasarana (tingkat kerusakan bangunan) bekerja sama dengan dinas ciptakarya dengan

menggunakan format PUPR,” imbuh Asep.

Sementara itu untuk alur penilaian, pertama satuan pendidikan melakukan input Dapodik, kemudian dinas Pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi Dapodik yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret. Sekolah yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan akan masuk ke sistem Dapodik, sedangkan sekolah yang tidak diverifikasi berarti tidak akan masuk filter Dapodik.

Selanjutnya pada sistem filter Dapodik akan dilakukan seleksi, verifikasi dan validasi oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menggunakan 2 kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Sekolah yang lolos sistem filter Dapodik akan masuk ke aplikasi Aplikasi Krisna.

“Pada bulan Juli setelah muncul di *longlist*, akan dipilih lagi oleh pemerintah daerah untuk diusulkan secara resmi melalui Aplikasi Krisna. Setelah diusulkan oleh Pemda, maka inilah yang masuk pada tim penilai di dalam Aplikasi Aplikasi Krisna,” pungkasnya. (*)

Sumber: Direktorat SD



Murid membaca buku di perpustakaan.

“

Alangkah baiknya jika dinas pendidikan melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pemutakhiran data Dapodik. Misalnya mengundang para operator sekolah untuk mengecek kembali apakah data yang mereka update di Dapodik sudah benar.

Eko Susanto

Widyapra Ahli Madya
Direktorat Sekolah Dasar

PERSIAPKAN KUALITAS GURU KELAS I SD

Guru kelas I sekolah dasar punya peran vital dalam mewujudkan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Para guru ini setiap hari menemani dan membimbing anak-anak yang baru beranjak dari usia PAUD. SDN Kapukanda, Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta punya strategi menghadirkan suasana nyaman dan menyenangkan bagi murid baru di kelas rendah. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan guru berkualitas untuk mengajar di kelas I.

Endah Sri Sulistyowati, Kepala SDN Kapukanda mengatakan, sebelum melaksanakan penerimaan murid baru, sekolahnya sudah memilih guru untuk kelas satu berdasarkan kemampuan dan kreatifitas dalam perencanaan pembelajaran. Selain itu, guru tersebut harus mampu berkolaborasi dengan guru lain seperti guru bidang studi.

Guru terpilih adalah yang sudah mengikuti bimbingan teknis Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, sehingga mampu melaksanakan program ini dengan baik. Namun demikian, semua guru di SDN Kapukanda diharapkan siap apabila suatu saat diminta mengajar kelas I.

"Saya turut mendampingi guru kelas I dan ikut menjadi pengajar dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan tema yang telah direncanakan bersama," tutur Endah Sri Sulistyowati.

Agar kemampuan guru mumpuni dan siap mengajar kelas I, selain mengirim mereka untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis Transisi PAUD ke SD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, para guru kelas I juga menimba ilmu dan pengalaman dari Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta dari diskusi di Kelompok Kerja Guru (KKG)



Guru membimbing murid kelas I SD belajar menggambar.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

kelas I dengan mendatangkan narasumber yang sesuai.

"Guru juga ikut dalam komunitas Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan tingkat Kabupaten Sleman. Komunitas ini banyak memberikan informasi perkembangan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, dan guru mendapat bimbingan langsung dari narasumber," kata Endah.

Ia melanjutkan, dalam pelaksanaan PPDB pihak

sekolah telah membentuk tim. Tim inilah yang bersama-sama guru kelas I dan tim kurikulum merencanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta asesmen awal bagi murid kelas I.

"Sekolah memberi kesempatan guru kelas berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dalam pelaksanaan MPLS, guna merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain murid mengenal lingkungan sekolah, dalam MPLS ini sekolah mengenal wali atau orang

tua murid kelas I agar terjadi komunikasi yang baik demi kemajuan perkembangan murid," tuturnya.

Proses penerimaan murid baru di SDN Kapukanda dapat dilakukan melalui pendaftaran secara langsung maupun daring dengan menyertakan *foto copy* atau *scan* akta kelahiran dan kartu keluarga. Sedangkan pendaftar dengan menggunakan pedoman seleksi dengan zona atau jarak tempat tinggal murid dengan sekolah, harus menunggu pengumuman dan daftar ulang melalui system PPDB atau aplikasi.

"Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di SDN Kapukanda diawali dengan PPDB tanpa ujian calistung, namun berdasar zonasi dan usia. Setelah penerimaan murid baru selesai, kemudian diselenggarakan MPLS selama 10 hari yang di dalamnya terdapat asesmen awal siswa sebagai dasar perencanaan pembelajaran ke depan," jelasnya.

Endah mengungkapkan ada kejadian unik selama penerimaan calon murid baru. Ia kerap menemukan calon siswa yang minat sekolah di SDN Kapukanda namun orang tuanya tidak berkenan, atau sebaliknya orang tuanya yang

menginginkan anaknya sekolah di SDN Kapukanda tetapi anaknya yang enggan. Kondisi ini bisa menjadi penyebab motivasi murid menjadi kurang saat harus berangkat ke sekolah.

Dengan ragam karakter murid yang bermacam-macam tentu saja diperlukan cara agar anak-anak merasa nyaman dan senang menjalani aktivitas sekolah di SDN Kapukanda. Oleh karena itu para guru SDN Kapukanda dengan kompak mendesain ruang kelas seperti di sekolah TK atau PAUD, mengatur tempat duduk dengan berbagai variasi, bahkan kadang tidak menggunakan meja dan kursi saat belajar.

"Kami menggunakan alam dan lingkungan sebagai sumber belajar. Guru memberikan pembelajaran dengan menggunakan cara guru TK dengan sering memberikan pujian dan apresiasi, memberikan contoh langsung dalam melakukan pekerjaan, serta mendesain pembelajaran yang menyenangkan agar murid senang. Anak-anak merasa ketika masuk SD tidak ada perubahan berarti yang menyulitkan," tutur Endah.

Agar transisi PAUD ke SD

berjalan dengan baik, SDN Kapukanda selalu koordinasi dengan pemerintah daerah. Pihak Pemda selalu memberikan kesempatan kepada guru SDN Kapukanda menjadi peserta bimbingan teknis Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan melalui komunitas Guru Penggerak. Tidak jarang pula menjadikan guru maupun Kepala SDN Kapukanda sebagai narasumber dalam sosialisasi dan bimtek di tingkat kabupaten.

Tidak sampai di situ, SDN Kapukanda bekerjasama dengan Bunda PAUD Kelurahan dalam mengawal program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Bunda PAUD tingkat kelurahan juga menjadikan SDN Kapukanda sebagai rekanan yang secara berkala dilakukan tinjauan langsung terkait progres keterlaksanaan program Transisi PAUD ke SD.

"Selama menjabat sebagai kepala sekolah, hal yang saya lakukan adalah koordinasi dan saling kolaborasi antara guru, wali murid dan satuan pendidikan lainnya agar memiliki satu pandangan yang sama dalam menyukseskan program-program pemerintah," pungkasnya. (*)

SDN 22 BARINGIN BUDAYAKAN HIDUP SEHAT

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 22 Baringin, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat punya komitmen kuat mewujudkan sekolah sehat. Seluruh warga sekolah dibiasakan makan makanan sehat bergizi seimbang dan rutin melakukan aktivitas fisik. Sekolah ini terpilih menjadi tempat penyelenggaraan Gerakan Sekolah Sehat dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang dihadiri Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril pada Kamis (1/2).

Senyum mengembang di bibir Nailur Rahmi. Kepala SDN 22 Baringin ini bangga melihat semangat guru dan murid-murid mempersiapkan penampilan terbaik dalam kegiatan Gerakan Sekolah Sehat dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional Tahun 2024.

"Suatu kehormatan bagi sekolah kami dipilih oleh Kemendikbudristek menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Berhari-hari kami melakukan persiapan, termasuk mempersiapkan penampilan terbaik murid-murid kami. Semua guru dan murid semangat dan gembira," kata Nailur Rahmi.

Diikuti 114 murid yang ada di kabupaten Tanah Datar, kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai

aktivitas. Seperti festival permainan tradisional dan stan makanan dengan menu sehat bergizi seimbang. Ada empat permainan tradisional yang dimainkan oleh murid jenjang SD dan SMP, yaitu lore, congklak, gasiang, dan pacu karung. Peserta permainan tradisional berasal dari 7 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Untuk meningkatkan pemahaman murid mengenai menu sehat bergizi seimbang, beragam menu makanan ditampilkan di stan pameran. Untuk menu sarapan sehat ada nasi goreng sayur telur, martabak telur mie sayur, bubur kacang hijau, lontong gulai tauco, dan roti isi telur dan sayuran.

Kemudian menu bekal sehat menyajikan nasi sop ayam telur puyuh, nasi ikan pangek tempe tahu goreng, nasi rendang tumis buncis, nasi soto padang perkedel kentang, dan itiak lado mudo sayur capcay. Ada juga menu kantin sehat yang menyajikan tumbang ubi, risoles, telur puyuh tepung, makaroni telur, dan bika panggang.

Nailur Rahmi, Kepala SDN 22 Baringin

Sumber: Direktorat SD



Peserta acara Gerakan Sekolah Sehat berfoto bersama.

Sumber: Direktorat SD

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril makan buah bersama para siswa peserta Gerakan Sekolah Sehat. Iwan berpesan kepada anak-anak untuk rajin makan buah dan sayur. Apalagi di Kabupaten Tanah Datar yang subur banyak tumbuh buah dan sayur. Meskipun pada awalnya sayuran terasa pahit, tapi seiring waktu akan terasa enak di lidah serta manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan.

"Anak perlu terbiasa makan dan minum yang bergizi karena sangat penting mencukupi kebutuhan gizi anak usia sekolah. Anak juga perlu pembiasaan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gizi seimbang. Selain itu yang tidak kalah penting adalah anak harus terbiasa melakukan aktivitas fisik, salah satunya melalui permainan tradisional," ujar Iwan.

Kepada pihak sekolah, Iwan menyampaikan pesan bahwa sekolah harus menjadi contoh budaya hidup sehat bagi masyarakat di sekitarnya. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menggaungkan Gerakan

Sekolah Sehat di berbagai satuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Nailur Rahmi menegaskan sekolahnya berkomitmen untuk terus membiasakan hidup sehat kepada murid dan guru, baik melalui kegiatan fisik maupun makanan bergizi seimbang. Misalnya setiap hari Sabtu diselenggarakan kegiatan makan bersama. Menu makanan yang dibawa murid dari rumah masing-masing dicek satu per satu. Murid yang bekalnya belum memenuhi kategori gizi seimbang disarankan untuk melengkapinya pada jadwal selanjutnya.

"Ada saja orang tua yang membekali anaknya nasi goreng atau mie goreng. Memang perlu kesabaran untuk memberi pemahaman orang tua tentang makanan yang sehat bergizi seimbang. Nasi goreng dan mie goreng termasuk yang kami larang untuk bekal anak ke sekolah," tuturnya.

Mewujudkan sekolah sehat, kata Nailur Rahmi, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah dan guru, tetapi juga harus ada

keterlibatan orang tua murid. Oleh karena itu sekolahnya rutin melakukan komunikasi dengan orang tua murid supaya memiliki pemahaman yang sama tentang visi sekolah sehat untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

"Sekolah kami punya visi membentuk kebiasaan sehat fisik dan sehat bergizi untuk para peserta didik," katanya. Sehat fisik adalah upaya untuk mewujudkan kondisi di mana peserta didik memiliki badan yang sehat dan bugar serta terhindar dari penyakit.

Sedangkan sehat bergizi merupakan upaya mewujudkan pola makan yang sehat dengan mengonsumsi makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial bagi tubuh, serta mengurangi dan atau menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan.

"Dalam upaya mewujudkan sehat fisik, sekolah kami menyelenggarakan kegiatan senam sehat dua kali seminggu. Ada juga kegiatan pramuka yang



Rangkaian aktivitas Gerakan Sekolah Sehat di SDN 22 Baringin.



Sumber: BKHM Kemendikbudristek

mendorong aktivitas fisik dan kreativitas murid,” kata Nailur Rahmi.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Januar Pempri menyampaikan terima kasih kepada Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril yang bersedia meluangkan waktu mengunjungi SDN 22 Baringin dan bertemu dengan peserta didik. Ia yakin ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi murid dan kenangan indah yang tidak terlupakan.

”Bermain, bercengkrama dan makan bersama pak Dirjen merupakan sesuatu yang langka bagi anak-anak kami di daerah pedalaman ini,” katanya. Januar berharap pesan tentang budaya hidup sehat dan makan makanan bergizi seimbang dapat terus diingat dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga akan melahirkan generasi sehat, cerdas dan berkarakter.

Dirga Ramadhan, murid kelas 6 SDN 22 Baringin yang

mengikuti kegiatan tersebut mengaku senang permainan tradisional balap karung. Dirga juga senang dan bangga lantaran sekolahnya terpilih menjadi tempat diselenggarakannya Gerakan Sekolah Sehat yang di dalamnya ada permainan tradisional balap karung.

”Permainan tradisional itu menyenangkan dan sehat. Saya senang bermain permainan tradisional, terutama balap karung,” katanya. (*)



KETIKA MURID SD MANFAATKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SECARA BERETIKA

Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Hadir dalam berbagai bentuk, keberadaan AI menjadi dinamis dan mudah dijangkau oleh para penggunanya. Saat ini SDN 061 Cijerah, Bandung sudah menggunakan salah satu *generative AI* yang lebih simpel berbasis teks bernama Gemini atau Google Bard.



Murid SDN 061 Cijerah menggunakan artificial intelligence.

Sumber: Dokumentasi sekolah

Memfaatkan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan tidak hanya menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, tapi juga memberikan kemudahan bagi guru. AI membantu guru merencanakan pembelajaran dan asesmen awal yang lebih baik. Membantu merancang pembelajaran yang terdiferensiasi lebih cepat, dan

mengembangkan kreativitas anak dalam menggunakan teknologi saat proses pembelajaran.

"Ini berdasarkan pengalaman kami di SDN 061 Cijerah Bandung, Jawa Barat. Kami sudah memanfaatkan *artificial intelligence* dalam pembelajaran di kelas VI," kata Dadan Irsyada, Guru SDN 061 Cijerah.

Dadan menuturkan, ada

banyak yang bisa didapatkan dari kecanggihan AI. Misalnya dalam merancang perencanaan pembelajaran terutama dalam proses mengubah capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar dan bahan ajar. Melalui AI juga guru bisa membuat gambar ilustrasi sesuai kebutuhan, membuat soal dan jawaban dari sebuah video, atau untuk sekedar

mendapatkan ide baru yang cepat dan praktis saat akan membuat *ice breaking* di kelas.

Saat ini SDN 061 Cijerah sudah menggunakan salah satu *generative AI* yang lebih simpel berbasis teks bernama Gemini atau Google Bard. Alasannya, secara teknis *generative AI* ini dapat memperkenalkan *prompt* yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik dalam meningkatkan proses dan kreativitas saat pembelajaran berlangsung.

“Melalui Gemini kami dengan mudah dapat mengembangkan ide dan gagasan. Bahkan *generative AI* ini sudah kami perkenalkan kepada murid kelas VI di SDN 061 Cijerah,” kata Dadan.

Saat memperkenalkan Gemini kepada peserta didik, Dadan menyampaikan bahwa para guru di SDN 061 Cijerah terlebih dahulu fokus pada pengenalan etika dalam penggunaan teknologi. Sama halnya seperti ketika membahas etika dalam kehidupan sehari-hari, guru memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri dan menghindarkan diri dari dampak negatif teknologi digital, serta sebisa mungkin bijak dalam bersosial media.

Setelah memberikan pemahaman tentang etika teknologi digital dan sebelum mulai menggunakan aplikasi Gemini, guru membuat kesepakatan kelas secara kolaboratif. Kesepakatan bersama murid kelas VI ini dibuat melalui Google Classroom dan Google Slide.

Proses kesepakatan kelas ini dimulai dengan pertanyaan yang sederhana mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat menggunakan Gemini. Hal ini kemudian memicu diskusi intens antar kelompok. Proses pembuatan kesepakatan



Belajar bersama di kelas.

Sumber: Dokumentasi sekolah

kelas melibatkan 72 murid kelas VI-A dan VI-B dengan mengelompokkan murid ke dalam 15 grup.

Setelah proses diskusi berjalan dengan saling berbagi ide dan gagasan, akhirnya dibuatlah beberapa tahapan yang disepakati sebelum menggunakan Gemini.

Tahapan ini telah disetujui oleh murid-murid kelas VI dan guru. Tahap pertama, sebelum menggunakan Gemini guru terlebih dulu harus memberikan pemahaman terkait bahaya AI.

“Dalam tahap ini kita menjelaskan kepada murid dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan



AI. Seperti penyalahgunaan data, tentang pelanggaran hak cipta, dan keakuratan informasi yang didapat dari AI itu sendiri,” tutur Dadan.

Tahap kedua adalah proses membuat kesepakatan kelas tentang etika penggunaan Gemini dalam pembelajaran. Proses ini sangat penting dan merupakan hal yang menjadi fokus utama guru terutama mengenai etika pemanfaatan AI dalam pembelajaran. “Tahapan ini merupakan bentuk penerapan disiplin positif bagi murid di kelas, sekaligus menjadi acuan dan batasan dalam penggunaan AI di kelas,” ujar Dadan.

Tahap ketiga, murid mulai dikenalkan pada aplikasi Gemini dengan menggunakan *smartphone* masing-masing. Guru mendampingi dan mengarahkan saat murid melakukan pendaftaran Gemini sebelum akhirnya

mengakses aplikasi AI tersebut. Setelah berhasil mendaftar Gemini, barulah murid diajak untuk mencoba bagaimana memanfaatkan Gemini untuk proses pembelajaran yang praktis.

Beberapa manfaat Gemini yang sudah diperoleh SDN 061 Cijerah diantaranya membantu kepala sekolah melakukan proses pengembangan karakter atau perilaku yang harus muncul dari setiap elemen dimensi Profil Pelajar Pancasila, dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Manfaat dari sisi guru salah satunya adalah saat proses asesmen awal pembelajaran untuk mengukur kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

“Gemini juga sangat membantu guru dalam mengembangkan ide terkait ragam kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah dan di rumah untuk mendukung serta mengasah setiap kecerdasan anak yang berbeda beda,” ujar Dadan.

Secara sederhana, baik kepala sekolah, guru dan murid kelas VI SDN 061 Cijerah telah mengenal dan menggunakan Gemini untuk mempermudah banyak hal; pengembangan ide dan gagasan, mempermudah dalam mempersiapkan kebutuhan administrasi pembelajaran dari mulai perencanaan hingga asesmen pembelajaran.

Meskipun kecerdasan buatan atau AI memberikan banyak manfaat bagi guru dan murid, Dadan menyampaikan, guru perlu memahami bahwa kecerdasan buatan memiliki batasan pengguna. Agar murid terdigitalisasi dengan benar, guru harus mengenalkan AI sesuai etika penggunaan teknologi. Caranya melalui edukasi dampak positif dan negatif penggunaan AI. (*)

“

Guru menjelaskan kepada murid dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan AI. Seperti penyalahgunaan data, pelanggaran hak cipta, dan keakuratan informasi yang didapat dari AI.

Dadan Irsyada
Guru SDN 061 Cijerah





Murid memungut sampah.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

MENGHAPUS JEJAK SAMPAH MELALUI DAUR ULANG

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Petir 01 Kota Depok, Jawa Barat melakukan langkah nyata mengurangi sampah plastik. Para murid membuat produk daur ulang dengan metode *ecobrick* yang mudah dan sederhana.

Kesadaran masyarakat terhadap bahaya sampah yang mengancam keberlangsungan makhluk hidup di masa depan masih minim. Di Kota Depok, Jawa Barat, kondisi sampah mulai memprihatinkan. Tonase sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di Cipayang semakin meningkat hingga melebihi daya tampung.

Berangkat dari keresahan itulah timbul keinginan murid-murid SDN Pondok Petir 01 untuk menekan tonase sampah di TPA. Caranya dengan mengelola sampah secara lebih baik dan

melakukan daur ulang sampah. Berdasarkan hasil diskusi, sebagai langkah awal perlu dilakukan pemetaan jenis sampah dan membaginya ke dalam dua kategori, yaitu sampah organik dan sampah *non* organik.

"Dari hasil diskusi bersama di kelas, hanya sampah *non* organik yang akan diolah dalam rentang waktu 6 sampai 12 bulan ke depan," kata Muhammad Fajri, guru SDN Pondok Petir 01 Kota Depok.

Ia melanjutkan, murid-murid awalnya diberikan inspirasi berupa tayangan tentang

bagaimana mengolah sampah *non* organik secara sederhana, tanpa menggunakan alat berteknologi tinggi. Kemudian, dari tayangan tersebut mereka diberi kesempatan untuk mengulas sekaligus mengkritisi dari berbagai sudut pandang.

Proses diskusi berlangsung hangat karena setiap murid diberikan kesempatan berbicara tanpa batas. Setelah melakukan diskusi antar murid, mereka sepakat untuk mengolah sampah yang berasal dari plastik dan botol air minum dalam kemasan dengan menggunakan

metode *ecobrick*.

Metode *ecobrick* merupakan suatu metode yang dipakai untuk mengolah sampah berbahan dasar plastik menjadi barang pakai dalam berbagai bentuk dan fungsi. Umumnya, *ecobrick* merupakan metode pengolahan secara manual untuk mengalih-fungsikan sampah plastik menjadi barang pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti kursi, meja, perangkat penyimpanan untuk barang tertentu, pot bunga, dan lainnya.

Fajri mengatakan, cara membuat produk daur ulang dengan metode *ecobrick* sangatlah mudah dan sederhana. Meski demikian, perlu disesuaikan kemampuan murid sekolah dasar terutama bagi murid fase B dan C, yang harus mempertimbangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus murid di fase tersebut.

Langkah pembuatan daur ulang sampah dengan metode *ecobrick*, yang pertama mempersiapkan produk pengolahan sampah *non* organik. Kemudian sampah dibersihkan dan dikeringkan. Plastik bekas yang sudah dibersihkan,

dipastikan kering dan tidak berbau, lalu dipotong kecil-kecil dengan ukuran paling panjang 2 cm. Setelah semuanya menjadi satu ukuran dengan potongan kecil-kecil, dimasukkan ke wadah berupa botol air mineral, ditekan sampai padat dan dipastikan tidak ada rongga udara di dalam botol tersebut.

Untuk membuat karya dari daur ulang sampah *non* organik ini, SDN Pondok Petir 01 menggunakan bahan dasar botol air mineral dengan bentuk dan ukuran yang sama, supaya memudahkan menyusun dan membentuknya. "Ketika sudah terisi penuh, maka dapat ditutup dan siap menjadi bahan setengah jadi untuk dibentuk benda sesuai yang direncanakan," tutur Fajri.

Langkah berikutnya, dari barang plastik botol mineral yang sudah dipadatkan tersebut SDN Pondok Petir 01 khususnya kelas IV dan V membuat berbagai produk seperti rak sepatu, meja bulat, dan kursi. Proses selanjutnya adalah *finishing* yang dapat dilakukan dengan menutupi seluruh permukaan dasar dengan kain *flanel* lalu memberikan sentuhan warna menggunakan cat. Ketika sudah

sampai proses ini, maka barang tersebut sudah memiliki nilai ekonomis dan dapat ditentukan harga jual yang sesuai.

Fajri menjelaskan, rangkaian kegiatan dalam membuat barang yang memiliki nilai jual dari daur ulang sampah metode *ecobrick* ini memakan waktu lebih dari 6 bulan. Kegiatan ini memberikan pengalaman bermakna pada murid, salah satunya adalah kesadaran akan sampah yang tidak dapat hilang atau langsung terurai dalam waktu panjang.

"Aktivitas keseharian yang menghasilkan sampah apalagi sampah *non* organik akan memunculkan tumpukan sampah yang bisa saja tidak terkendali. Dari sini, murid belajar memprediksi apa yang terjadi jika tidak ada tindakan pencegahan," ujar Fajri.

Melalui daur ulang sampah *ecobrick*, murid pun tidak sekedar memahami teori tapi juga dapat melakukan tindakan nyata, berkreasi membuat produk yang bernilai dari sampah, dan bisa terus berinovasi dalam upaya melestarikan alam untuk keberlangsungan makhluk hidup. (*)



Ilustrasi produk hasil daur ulang sampah.

Sumber: kemdikbud.go.id

MENJAGA KERAGAMAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Kepala SDN Blimbing Lama 2, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sariyati Bahanah bercerita pengalaman sekolahnya menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah yang berada di daerah terpencil ini tidak memiliki pengalaman menangani murid berkebutuhan khusus. Berbekal tekad yang kuat, ia dan para guru terus belajar untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi murid berkebutuhan khusus.

SDN Blimbing Lama 2 merupakan sekolah di daerah terpencil. Saking jauhnya, Sariyati Bahanah harus naik motor selama lima jam dari rumahnya menuju sekolah. Ia tidak bisa pulang pergi dari rumah ke sekolah. Jadi, kepala sekolah yang baru menjabat selama satu tahun ini harus sering menginap di sekolah.

Berdiri di perkampungan yang hanya terdiri dari sekitar 100 rumah, SDN Blimbing Lama 2 punya 22 murid dari kelas I sampai kelas VI. Satu diantaranya adalah murid berkebutuhan khusus bernama Juhriansyah. Anak ini memiliki kebutuhan khusus berupa keterbelakangan mental. Ibunya yang sudah bersuami baru tidak merawatnya. Juhriansyah dirawat oleh neneknya yang tinggal di lokasi terpencil di seberang sungai, cukup jauh dari perkampungan.

Ketika baru masuk sekolah, Juhriansyah harus selalu diantar oleh neneknya menyeberang sungai, berjalan menuju sekolah, dan pulanginya dijemput. Sekarang setelah kelas tiga, anak ini bisa pergi ke sekolah sendirian, menyeberang sungai sendiri, sudah bisa menulis angka 1 sampai 10, dan sudah bisa menulis abjad dari A sampai Z.

"Kami tidak pernah membatasi dia bergaul dengan siapa saja. Walaupun Juhriansyah kelas III, ia boleh saja ikut temannya masuk



Murid berkebutuhan khusus mencium tangan guru.

Sumber: BKHM Kemendikbudristek

di kelas IV atau kelas manapun, yang penting dia gembira," tutur Sariyati Bahanah dalam acara talkshow peluncuran 'modul pelatihan berjenjang tentang pendidikan inklusif' yang tayang live di Youtube Kemendikbud RI, Kamis, 21 Maret 2024.

Kepala sekolah, guru dan praktisi pendidikan menyambut baik diluncurkannya modul pelatihan berjenjang tentang pendidikan inklusif oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen) Kemendikbudristek.

Modul ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan.

"Sekolah kami, guru-guru kami tidak punya pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus. Tapi kami punya tekad kuat untuk terus belajar sehingga bisa memberikan layanan terbaik bagi murid berkebutuhan khusus seperti Juhriansyah. Modul pendidikan berjenjang pendidikan inklusif yang sudah diunggah di Platform Merdeka Mengajar

akan sangat membantu guru-guru kami mengembangkan kompetensi,” kata Sariyati.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Mujiyono, Guru SMAN Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur mengungkapkan isi hatinya yang kurang bisa ikhlas ketika tahun 2012 sekolahnya diminta menerima murid berkebutuhan khusus. Sekolah tempatnya mengajar memiliki 1.000 murid.

“Mengajar murid non disabilitas saja repot, apalagi mengajar murid penyandang disabilitas,” ujar Muhammad Mujiyono dalam hati ketika mendengar sosialisasi yang disampaikan oleh kepala sekolah. Menurutnya, kedongkolan itu timbul disebabkan pengetahuannya yang sempit tentang murid berkebutuhan khusus. Tapi seiring pengetahuannya bertambah, ia bisa memahami pentingnya memberi pelayanan pendidikan setara kepada anak berkebutuhan khusus.

Saat ini sudah ada 16 murid berkebutuhan khusus yang bersekolah di SMAN Gedangan Sidoarjo. Seluruh ekosistem pendidikan di sekolah tersebut sangat mendukung kehadiran murid berkebutuhan khusus. Bahkan sebagai dampak dari perannya mendidik anak berkebutuhan khusus, Muhammad Mujiyono berkesempatan kursus singkat di Australia selama sebulan.

Mujiyono bercerita, tantangan yang dihadapi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus tidak mudah. Pernah suatu ketika, ada anak penyandang autisme ikut tes di kelas yang diawasi oleh pengawas. Tentu saja tidak ada contek-contekan dalam tes tersebut. Rupanya kondisi ini membuat marah anak berkebutuhan khusus. Ia kemudian menjambak

rambut teman perempuan di sampingnya, dan menariknya ke belakang sambil berteriak kencang.

Mendengar teriakan itu, seluruh siswa yang mengerjakan tes di kelas berhamburan lari ke luar kelas. Para guru berusaha keras menenangkan situasi. Anak berkebutuhan khusus dibawa ke ruangan yang telah ditata secara khusus agar tantrumnya menurun. “Semua sigap bergerak karena komunitas inklusif sudah terbentuk di sekolah kami,” katanya.

Bahkan orang tua yang anaknya dijambak bisa memahami situasi tersebut dan tidak mengajukan protes ke sekolah. Mujiyono berharap situasi seperti ini dapat terbentuk di seluruh sekolah di Indonesia. Diluncurkannya modul pelatihan berjenjang tentang pendidikan inklusif diharapkan dapat mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, dalam sambutannya mengatakan bahwa program pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang bagi guru terkait pendidikan inklusif ini, merupakan salah satu upaya Kemendikbudristek mendorong sekolah agar dapat menjadi “safe house”, atau ekosistem yang mampu melindungi, merawat, dan menjaga keragaman di lingkungan pendidikan.

“Dalam pendidikan kita harus betul-betul mengenal anak kita seperti apa, sehingga tumbuh kembangnya harus kita sesuaikan dengan kodrat dan fitrah penciptaan dari sang maha kuasa. Ini adalah filosofi berpihak pada anak, dan filosofi inilah yang menjadi roh dari setiap Merdeka Belajar sejak episode 1

sampai saat ini sudah memasuki episode ke-26,” ujar Iwan.

Ia juga mengingatkan agar seluruh ekosistem pendidikan terus melakukan kerja kolaborasi, mengambil peran serta, untuk mewujudkan pendidikan inklusif. Termasuk menguatkan peran Pemerintah Daerah agar membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD), yang bukan saja di tingkat provinsi tapi juga kabupaten/kota, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Pendidikan dan pelatihan berjenjang untuk guru ini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu: tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tingkat mahir. Modul tingkat dasar terdiri dari beberapa topik, di antaranya Keberagaman Peserta Didik, Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik, serta Kolaborasi untuk Lingkungan Belajar yang Aman, Ramah, dan Menyenangkan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengatakan bahwa modul pelatihan tersebut dapat dipelajari secara mandiri dan bersama-sama oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah/penilik di seluruh Indonesia. Pelatihan berjenjang tentang pendidikan inklusif melalui modul pembelajaran ini dapat diakses di Platform Merdeka Mengajar (PMM).

“Saya berharap agar guru-guru di seluruh Indonesia mau belajar agar dapat membantu mewujudkan ekosistem satuan pendidikan yang aman, ramah, dan menyenangkan,” katanya. (*)



PAYUNG HUKUM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi implementasi Kurikulum Merdeka.

“Semoga Permendikbudristek ini memberi kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan”, tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Rabu (27/3).

Sebelum Permendikbudristek ini terbit, Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar pendidik dan satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka dikembangkan sejak 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak 2021. Saat ini sudah lebih dari 300 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang mulai menerapkan Kurikulum Merdeka.

“Kami berterima kasih kepada lebih dari 300 ribu satuan pendidikan yang secara sukarela

menerapkan Kurikulum Merdeka, juga kepada semua pihak yang telah bergotong royong dalam evaluasi dan pengembangan Kurikulum Merdeka ini,” lanjut Nadiem Makarim.

Permendikbudristek 12/2024 adalah bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Kebijakan ini melengkapi berbagai kebijakan Merdeka Belajar lain seperti penyediaan materi ajar dan pengembangan diri melalui Platform Merdeka Mengajar; penyediaan umpan balik tentang kualitas pembelajaran melalui Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan; serta evaluasi terhadap layanan pendidikan melalui akreditasi sekolah dan SPM pendidikan.

“Kurikulum Merdeka memberi lebih banyak waktu bagi guru untuk memperhatikan proses belajar murid, menerapkan asesmen formatif, melakukan

penyesuaian materi dan kecepatan mengajar, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendalam,” ujar Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo.

Struktur Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel juga memungkinkan sekolah untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang cocok dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat.

“Dengan struktur yang fleksibel, Kurikulum Merdeka bisa diterjemahkan oleh sekolah yang minim fasilitas di daerah terpencil menjadi kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kondisinya. Tidak ada lagi penyeragaman kurikulum satuan pendidikan yang diwajibkan dari pusat. Penyesuaian lokal ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan,” kata Anindito. (Sumber: Siaran pers Kemendikbudristek)

PEMBARUAN DATA RAPOR PENDIDIKAN 2024

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Rapor Pendidikan untuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam agenda Sosialisasi Rapor Pendidikan 2024 di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikbudristek, Selasa (5/3). Peluncuran tersebut sekaligus menyosialisasikan pembaruan data Rapor Pendidikan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Rapor Pendidikan Daerah.

Tiap tahunnya, Kemendikbudristek terus melakukan pembaruan data Rapor Pendidikan secara berkala, sebagai referensi untuk menentukan prioritas pembenahan pendidikan. Hadirnya Rapor Pendidikan untuk satuan PAUD sekaligus upaya menunjukkan kuatnya komitmen Kemendikbudristek terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai proses yang berkelanjutan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, dalam agenda sosialisasi tersebut mengungkapkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pada sekolah di berbagai jenjang pendidikan beberapa tahun belakangan ini, telah membawa dampak positif. Ia mengajak satuan pendidikan untuk terus bersemangat dalam mengukuhkan sinergi dengan Kemendikbudristek. Kementerian berkomitmen untuk mendampingi satuan pendidikan mengatasi berbagai tantangan dalam membenahi dunia pendidikan.

"Satuan pendidikan tidak sendirian dalam melakukan proses pembenahan karena ini merupakan usaha bersama. Berbagai alat bantu juga telah disiapkan, untuk bisa dioptimalkan



Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim hadir secara virtual.

Sumber: kemdikbud.go.id

oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing," ujar Nadiem, di Jakarta, Selasa (5/3).

Rapor Pendidikan, lanjut Mendikbudristek, merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar yang menjadi salah satu alat bantu bagi satuan pendidikan untuk melakukan identifikasi kondisi layanan satuan pendidikan, refleksi untuk menentukan prioritas pembenahan, dan menyusun rencana pembelajaran. Berdasarkan prioritas pembenahan tersebut, satuan pendidikan memiliki acuan dalam melakukan peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuannya secara berkelanjutan.

Setelah sebelumnya Rapor

Pendidikan yang dilengkapi dengan data level nasional bisa diakses oleh satuan pendidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maupun pemerintah daerah; kini satuan PAUD dapat mengakses hasil Sulingjar di Rapor Pendidikan. Dengan demikian, satuan PAUD dapat mengidentifikasi permasalahannya dengan lebih baik demi meningkatkan layanan pendidikannya.

"Peningkatan layanan pendidikan ini butuh dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, bahkan orang tua sehingga proses pembenahan yang dilakukan lebih optimal," ujar Mendikbudristek. (*)

SEMANGAT DIREKTORAT SD MENUJU ZI-WBK

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik guna mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang, perlu dilakukan reformasi birokrasi.

Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbudristek menyadari pentingnya upaya mempercepat reformasi birokrasi dan pembangunan menuju Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).

Mengawali tahun 2024, Direktur Sekolah Dasar Muhammad Hasbi telah menerbitkan Keputusan Direktur Sekolah Dasar tentang Pengangkatan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Tim Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unsur pegawai dan tim kerja.

Tim agen perubahan Direktorat Sekolah Dasar bertugas menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda agen perubahan; mengimplementasikan rencana aksi agen perubahan yang telah disusun; menginternalisasikan nilai-nilai yang sudah dirumuskan dengan cara komunikasi aktif dan langsung agar menjadi budaya kerja di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar; dan melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi agen perubahan.

Terdapat enam area perubahan yang menjadi fokus utama, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam kegiatan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pegawai Direktorat Sekolah Dasar di Garut, Jawa Barat pada awal Februari 2024, enam area perubahan tersebut didesain menjadi kelompok-kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan



Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi (tengah) berfoto bersama jajaran Ketua Tim Kerja.

Sumber: Direktorat SD

nilai-nilai kerjasama kelompok, interaksi kelompok dan kemudian hasilnya diskusikan secara intensif. Dari hasil diskusi itu muncul berbagai ide dan solusi untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka reformasi birokrasi dan pembangunan menuju ZI-WBK.

"Saya berharap hasil diskusi kita ini menjadi bahan acuan untuk disusun lebih rinci lagi, sehingga agenda perubahan bisa dilaksanakan dengan baik," kata Direktur Sekolah Dasar, Muhammad Hasbi.

Pada area perubahan 'peningkatan kualitas pelayanan publik' misalnya, tim diskusi yang dipimpin Iwhan Ambar Saputro memunculkan berbagai ide dan inovasi, diantaranya adalah menghadirkan Unit Layanan Terpadu (ULT). Sehingga kendala-kendala yang muncul terkait implementasi kebijakan dan program Kemendikbudristek di tingkat pelaksanaan bisa dikomunikasikan dengan baik.

Seperti diketahui, Direktorat Sekolah Dasar menangani sekitar

149.000 sekolah dasar di seluruh Indonesia, yang di dalamnya terdapat ratusan ribu kepala sekolah, guru, dan jutaan murid. Direktorat SD juga secara intens berkoordinasi dengan dinas pendidikan di 514 kabupaten dan kota. Mereka inilah yang membutuhkan layanan dengan kualitas prima. "Saya yakin Direktorat SD bisa menghadirkan inovasi layanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga sekolah dan stakeholder pendidikan," kata Jumeri, Widyaprada Ahli Utama Direktorat Sekolah Dasar.

Pada kesempatan itu, seluruh pegawai Direktorat Sekolah Dasar menandatangani komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan menuju Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). "Penandatanganan komitmen bersama ini merupakan tonggak awal yang sangat penting untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," kata Arwan Syarief yang memimpin kegiatan dinamika kelompok yang juga selaku Ketua Tim RBI Direktorat SD.



**MERDEKA
BELAJAR**

**HAI, SAHABAT SEKOLAH DASAR!
AYO MENJADI BAGIAN DARI GIAT SD
DENGAN CARA MEMINDAI KODE QR INI.**



Benahi Satuan Pendidikan dari Langkah yang Paling Sederhana

Kini Rapor Pendidikan dilengkapi fitur Rekomendasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang memudahkan kepala satuan pendidikan bersama semua yang berperan dalam satuan pendidikan untuk melakukan pembenahan. Pelajari Ringkasan Kualitas satuan pendidikan Anda lalu unduh iRekomendasi PBD.

Cek Rapor Pendidikan
Link: <https://bit.ly/3BRVddn>



Mulai Benahi, Mulai dari Rapor Pendidikan

